

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

NOMOR: 75/KP.07/GO/11/2023

TENTANG

**PERPANJANG KONTRAK PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KOTA GORONTALO, BAWASLU
KABUPATEN BOALEMO, BAWASLU KABUPATEN POHUWATO, DAN BAWASLU KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan berakhirnya kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bawaslu Kota Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Boalemo, Bawaslu Kabupaten Pohuwato, dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 November 2023, sehingga dipandang perlu untuk memperpanjang kontrak PPNPN sebagaimana Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2217/KP.07/SJ/11/ 2023 tertanggal 24 November 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686438/2023 tanggal 30 November 2022.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2217/KP.07/SJ/11/2023 tertanggal 24 November 2023 Perihal Status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERPANJANG KONTRAK PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO, BAWASLU KOTA GORONTALO, BAWASLU KABUPATEN BOALEMO, BAWASLU KABUPATEN POHUWATO, DAN BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.**
- PERTAMA** : menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bawaslu Kota Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Boalemo, Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagaimana Diktum PERTAMA berkewajiban:
1. Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
 2. Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, Jujur dan Adil;
 3. Bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang sudah ditetapkan;
 4. Taat terhadap disiplin jam masuk kerja pada masing-masing Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
 5. Dapat bekerja sama yang baik dengan semua Pegawai dilingkup Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
 6. Melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan oleh atasan/pimpinan.
 7. Tunduk dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat Pegawai Bawaslu.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 29 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gorontalo
Pada tanggal : 29 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



NIKSON ENTENGO

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 75/KP.07/GO/11/2023
Tentang : Perpanjangan Kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kota Gorontalo, Bawaslu Kabupaten
Boalemo, Bawaslu Kabupaten Pohuwato, dan Bawaslu
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023.

Bawaslu Provinsi Gorontalo

NO	NAMA	BAGIAN
1	Awan Abdullah	Administrasi
2	Ibnu Lawani	Administrasi
3	Adityo Setiawan Ibrahim, S.AP	Administrasi
4	Ahmad Polamolo, S.E	Administrasi
5	Norpin Ahmad, S.IP	Administrasi
6	Mustika Hidayat Al Anshori. S.Kom	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
7	Ahmad Ali, S.Kom	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
8	Armin Nur, S.Hi	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
9	Ismi Febrina Mustafa, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
10	Didit Suhandono, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Bawaslu Kota Gorontalo

NO	NAMA	SUB BAGIAN
1	Farida Muhsin	Administrasi
2	Rofiudin Jr. Tilome, S,E	Administrasi
3	Sriyanti Lasindrang	Administrasi
4	Moh. Fahmi Kasim, S.Pi	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
5	Ikbal Arbie, S.Si	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
6	Vidya Gumanti, S.Hi	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Bawaslu Kabupaten Boalemo

NO	NAMA	SUB BAGIAN
1	Fitriyanti T. Pakaya, S.KM., M.Si	Administrasi
2	Moh. Reza Firmansyah Sofyan, S.Kom	Administrasi
3	Nolvionita Sofyan, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
4	Yahya Karuana, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

NO	NAMA	SUB BAGIAN
1	Ida Royana, S.E	Administrasi
2	Sri Mahdalona Machmud, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
3	Rizal Tongkodu, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
4	Amrain U. Koli, S.Pd	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
5	Alyasin Tarib, S.I.P	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
6	Rizq Menashar, S.H	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Kabupaten Pohuwato

NO	NAMA	SUB BAGIAN
1	Kasim Yonu, S.I.P	Administrasi
2	Fitriani Abdul Azis, S.Kom	Administrasi
3	Inda Rasid	Administrasi
4	Indrawaty Saleh, S.P.d	Administrasi
5	Noldi K. Mohi, S.E	Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
6	Alfris Podungge, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
7	Mahmud Diko, S.H	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Ditetapkan : di Gorontalo
Pada tanggal : 29 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



NIKSON ENTENGO